

# PERAN IKHWANUL MUSLIMIN DALAM MEMBANGUN POLITIK LUAR NEGERI MESIR PASCA REVOLUSI 2011 – Tahun 2012

*Muhammad Fajril Amini\**  
*Dosen Pembimbing : Faisyal Rani*

## ABSTRACT

*This paper describes the role of Islamic movement “Muslim Brotherhood” to establish a new foreign policy post Egyptian revolution 2011. It stressed to the influences of MB’s Islamic sunni ideology to construct the president’s view as decision maker for the creation of the new pattern of new Egypt’s foreign policy post Mubarak regime until last of 2012. The roles that played by Morsi as Egyptian president from MB organization, will be assumed as an organization roles. The research question in this research is “How are the roles of the Muslim Brotherhood to construct egypt’s foreign policy post revolution?”. The research uses qualitative methods, and uses case study as a strategy in this research. In this research, the datas is collected by library research techniques where this techniques is collecting data sourced from the literature, like books, websites, official publications, newspaper, and journal. This research is used Mohtar Mas’oed’s role theory to describe the role of MB movement with constructivist approach. And to show how this role work in Egyptian foreign policy will explain with William D. Coplin’s determinant of foreign policy theory. This paper shows that the MB played a major role in constructing Egyptian foreign policy. IM ideology succeeds in forming a new pattern of Egyptian foreign policy. The New pattern is successfully explained by the determination of foreign policy Coplin, that Egypt strengthen ties with affiliation circles (Arab, Africa, and Islam) and seeks to reduce dependence on the U.S.*

*Keyword : Muslim Brotherhood, Foreign Policy, Egypt, Idiology*

## Pendahuluan

Dalam dunia politik kontemporer, banyak para ahli yang meyakini bahwa politik dan keyakinan (kepercayaan) adalah hal yang terpisah dan tidak ada lagi yang menerapkannya dalam bernegara. Namun diabad ini masih tumbuh gerakan-gerakan yang besar, kokoh dan berpengaruh yang berdasarkan kepada keyakinan akan tuhan untuk membangun sebuah negara yang baik. Gerakan Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu gerakan Islam terbesar yang terorganisir dan berpengaruh di Mesir, di Timur Tengah, Afrika Utara, bahkan berpengaruh diberbagai belahan dunia. Mark Lilla seorang profesor politik di Amerika Serikat dalam *The New York Times Magazine* “*The Politics of God*” Agustus 2007 mengungkapkan :

*“We in the West find it incomprehensible that theological ideas still inflame the minds of men, stirring up messianic passions that can leave societies in ruin. We had assumed that this was no longer possible, that human beings had learned to separate religious questions from political ones, that political theology died in 16h-century Europe. We were wrong.”<sup>1</sup>*

Ikhwanul Muslimin (IM) meyakini bahwa Islam bukanlah sekedar agama yang menuntut keyakinan dan rangkaian kegiatan-kegiatan ibadah semata, akan tetapi Islam adalah solusi

---

\*Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UR Angkatan 2008

<sup>1</sup> Michelle Paison,. 2009. “*The History of the Muslim Brotherhood: The Political, Social and Economic Transformation of the Arab Republic of Egypt*”. Hal. 1

untuk semua hal. IM menekankan bahwa Islam adalah ideologi yang menyeluruh (*comprehensive*) untuk kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, serta sebagai landasan membangun masyarakat dan negara Islam.<sup>2</sup> Hassan Albanna pendiri IM menyebutkan bahwa:

“... *Islam adalah aqidah dan ibadah, negara dan kewarganegaraan, toleransi dan kekuatan, moral dan material, peradaban dan perundang-undangan.*

...”<sup>3</sup>

Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi Islam yang didirikan atas dasar keinginan untuk menyatukan umat Islam setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924. Hasan Albanna mendirikan organisasi ini tahun 1928 untuk merangkul masyarakat Mesir agar kembali menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan dan berupaya membentengi kebudayaan barat yang berkembang di Mesir. Tahun 1952, IM bergabung dengan militer Mesir berhasil menggulingkan raja Farouq yang dinilai sudah menjadi boneka kerajaan Inggris. IM tumbuh membangun Mesir bersama militer hingga terjadi perselisihan dengan Gamal Abdul Naser yang menilai gerakan keagamaan mengancam stabilitas nasional. IM di bubarkan dari Mesir dan menyebar diberbagai kawasan Timur Tengah.

Setelah meninggalnya Gamal Abdul Naser, Anwar sadat yang menggantikan posisi presiden mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas pemerintahannya akibat pengaruh komunis. Sadat membebaskan anggota-anggota IM yang ditahan selama pemerintahan Sadat dan memanggil pemimpin IM yang berada di luar negeri. Sadat memanfaatkan organisasi ini untuk mendapatkan dukungan dan menekan perkembangan komunis. Namun situasi ekonomi Mesir yang tidak stabil akibat perperangan yang berkelanjutan dengan Israel menjadi beban pemerintahan Sadat. Untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut, Sadat memilih mengikuti diplomasi yang dilakukan AS untuk mengakhiri perang dengan Israel dan menyepakati perjanjian damai dengan Israel tahun 1978 dan 1979. Hasil dari kesepakatan tersebut memberikan Mesir atas hak milik Sinai dan Mesir menerima bantuan militer serta ekonomi berkelanjutan dari AS. Namun konsekuensi dari tindakan tersebut, Mesir dikucilkan dari dunia Arab dan kehilangan pengaruh dikawasan Timur Tengah. Gerakan-gerakan ekstrimis pun bermunculan yang berujung pada pembunuhan Anwar Sadat. Tahun 1981, Husni Mubarak memimpin Mesir dengan menjalankan apa yang telah dimulai oleh pendahulunya Sadat. Ikhwanul Muslimin dibiarkan berkembang namun tetap dianggap sebagai organisasi ilegal.

Kebijakan luar negeri Mubarak tunduk pada kepentingan AS di Timur Tengah. Kebijakan yang dikeluarkan Mubarak cenderung menguntungkan AS dan sekutunya Israel. Sebagai negara Arab dan mayoritas muslim, Mesir tidak lagi menjalankan perannya dengan semestinya. Kebijakan terhadap kawasan Afrika hanya untuk mengambil keuntungan dari Sungai Nil dan menolak untuk membicarakan pembagian secara adil. Hubungan Mesir-Afrika tidak baik selama rezim Mubarak. Meskipun terjadi banyak tuntutan dari kelompok-kelompok masyarakat, Mubarak tidak memberikan lawan politiknya untuk tampil menyainginya. Kelompok Ikhwanul Muslimin terus mengawalinya dari parlemen, dengan alasan keamanan dan stabilitas negara Mubarak selalu membubarkan Parlemen jika tidak mendukung pemerintah. Meskipun ilegal aktifitas gerakan IM tetap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kecil melalui kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Setelah 30 tahun rezim Mubarak bertahan, negara-negara Arab dilanda gelombang protes terhadap pemerintah-pemerintah. Demonstrasi pertama terjadi di Tunisia, menuntut mundur rezim Ben Ali menjadi pememicu semangat reakyat Mesir menyuarkan tuntutan untuk mengakhiri rezim

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin* 2. Hal. 67

Mubarak. Desakan yang besar memaksa Mubarak untuk meletakkan jabatannya pada tanggal 11 Februari 2011.

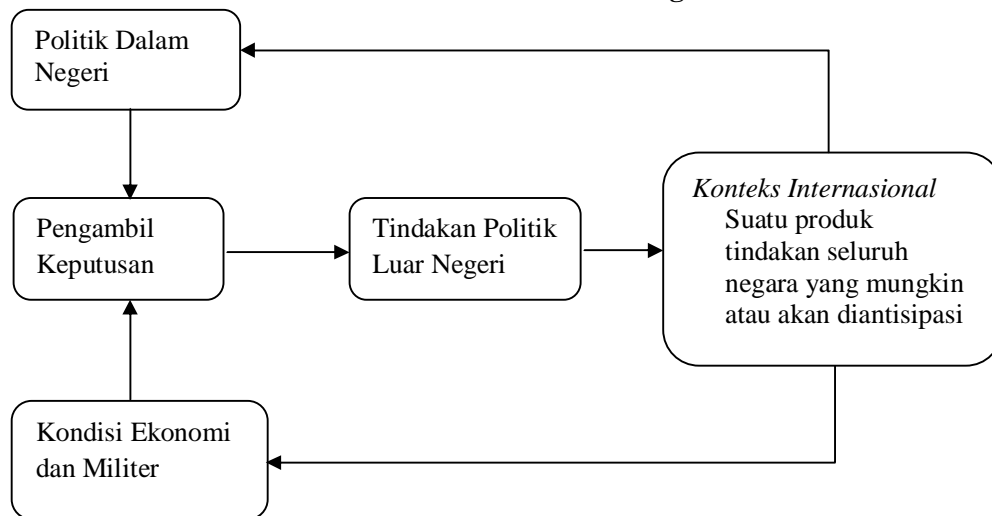
30 April 2011, IM mendirikan partai *Freedom and Justice Party* (FJP) sebagai sayap politik untuk mengikuti pemilihan parlemen Desember 2011- Januari 2012. IM berhasil memenangkan 47,2 % suara dan diikuti oleh partai An-Nour yang berafiliasi dengan kelompok Salafi 24,22% suara. Kemenangan FJP dan An-Nour menjadikan parlemen Mesir di dominasi oleh kelompok Islam. Muhammad Mursi yang diusung Ikhwanul Muslimin dan Partai An-Nour memenangkan pemilihan presiden pada bulan Juni 2012. Setelah terpilihnya Mursi sebagai presiden baru Mesir secara demokratis, Mursi mulai melakukan pergeseran pola politik luar negeri Mesir.

### Teori

Teori pertama yang digunakan untuk menjelaskan peran kelompok IM dalam membangun politik luar negeri Mesir adalah teori peran (*role theory*). Peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh orang yang menduduki suatu posisi. Teori peran menegaskan bahwa “*perilaku politik...adalah perilaku dalam menjalankan peran politik*”.<sup>4</sup> Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipengang oleh seorang aktor politik.<sup>5</sup> Sesuai dengan teori ini, Ikhwanul Muslimin merupakan aktor yang memiliki peran politik untuk membangun politik luar negeri Mesir yang lebih baik setelah revolusi terjadi.

Kedua, untuk melihat bagaimana peran IM dalam membangun politik luar negeri Mesir penulis akan menggunakan teori politik luar negeri dari William D. Coplin yang menyatakan bahwa politik luar negeri ditentukan oleh konteks internasional, perilaku pengambil keputusan, dampak kondisi ekonomi dan militer terhadap suatu negara dan peran politik dalam negeri.

**Skema 1.1 Bagaimana Empat Determinan Mempengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri**



Sumber: William D. Coplin., 2003. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah dan Teoretis. Edisi Kedua*. Hal. 30

<sup>4</sup> Mohtar Mas' oed. *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi*. PAUSS-UGM, Yogyakarta. Hal. 44

<sup>5</sup> *Ibid.*

Teori Coplin mengemukakan empat determinan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Berdasarkan teori ini, penulis akan menggambarkan dimana pengaruh IM dan bagaimana pengaruh IM dalam kebijakan luar negeri Mesir. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan dua penilaian. Pertama penulis akan menjelaskan pengaruh IM pada masa sebelum revolusi, dan kedua pengaruh organisasi ini pasca revolusi Mesir.

Skema 1.1 memperlihatkan bagaimana empat determinan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Empat determinan tersebut adalah : konteks internasional, kondisi politik dalam negeri, keadaan ekonomi dan militer, dan pengambil keputusan kebijakan luar negeri. Keempat determinasi tersebut akan memberikan pengaruh dalam pembentukan politik luar negeri. Pasca terjadinya revolusi dan terpilihnya Muhammad Mursi sebagai presiden Mesir penulis menempatkan IM sebagai pengambil keputusan. Latar belakang Muhammad Mursi sebagai tokoh Ikhwanul Muslimin akan mempengaruhi tindakan politik luar negerinya sebagai bagian kebijakan kelompok. Keputusan Mursi juga akan dipengaruhi oleh keadaan realitas politik domestik Mesir serta keadaan perekonomian dan kondisi Militer Mesir. Selain itu, kondisi lingkungan luar negeri Mesir juga akan menjadi faktor peting dalam mempengaruhi Mursi dalam mengambil tindakan. Oleh sebab itu, dengan akumulasi dari keempat determinan tersebut penulis akan memperlihatkan pola baru politik luar negeri Mesir pasca revolusi Mesir.

Dalam menelaah kajian ini penulis menggunakan tingkat analisa *perilaku kelompok* yaitu tingkat analisa yang memiliki asumsi bahwa individu pada umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok.<sup>6</sup> Pada dasarnya hubungan internasional ditentukan bukan oleh individu akan tetapi ditentukan oleh kelompok kecil, seperti kabinet, dewan penasihat militer, organisasi, partai politik, kelompok-kelompok penekan, departemen, dan lain sebagainya. Dalam kajian ini, penulis berasumsi bahwa pemerintahan Mesir pasca revolusi merupakan bagian dari tindakan kelompok Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok pemegang kekuasaan.

Sudut pandang atau perspektif yang penulis gunakan dalam menjelaskan fenomenas ini adalah perspektif konstruktivisme. Prinsip utama dari konstruktivisme adalah keyakinan bahwa "Politik internasional dibentuk oleh ide-ide persuasif, nilai-nilai kolektif, budaya, dan identitas sosial". Konstruktivisme berpendapat bahwa realitas internasional secara sosial dikonstruksi oleh struktur kognitif yang memberikan makna terhadap dunia material. Manusia adalah makhluk individual yang dikonstruksikan melalui realitas sosial. Konstruksi atas manusia akan melahirkan paham intersubektivitas. Hanya dalam proses interaksi sosial, manusia akan saling memahaminya. Dalam melihat hubungan antar sesama individu, nilai-nilai relasi tersebut bukanlah diberikan atau disodorkan oleh salah satu pihak, melainkan kesepakatan untuk berinteraksi itu perlu diciptakan di atas kesepakatan antar kedua belah pihak. Dalam proses ini, faktor identitas individu sangat penting dalam menjelaskan kepentingannya. Interaksi sosial antar individu akan menciptakan lingkungan atau realitas sosial yang diinginkan. Dengan kata lain, sesungguhnya realitas sosial merupakan hasil konstruksi atau bentukan dari proses interaksi tersebut.

## **Pembahasan**

Mesir merupakan negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Timur Tengah. Terletak diantara daerah konflik Palestina dan Israel sehingga Mesir memiliki peran yang sangat penting dalam membantu penyelesaian konflik dan membantu menciptakan keamanan. Selain itu, Mesir merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam yang aktif dan berpengaruh dalam situasi politik di kawasan Timur Tengah.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 41

Dengan posisi strategis Mesir di Timur Tengah, politik luar negeri Mesir cenderung dipengaruhi oleh lingkungan luar negeri. Dinamika politik Timur Tengah yang rawan konflik sangat mempengaruhi politik luar negeri Mesir. Di era pemerintahan Husni Mubarak, Mesir merupakan negara sekutu AS yang membantu keberlangsungan kepentingan AS di Timur Tengah terutama terkait keberadaan Israel yang terjalin sejak penandatanganan perjanjian *Camp David*. Kedekatan AS dan Mesir menyebabkan politik luar negeri Mesir cenderung menguntungkan kepentingan-kepentingan AS di Timur Tengah dan banyak merugikan kelompok-kelompok Islam yang merupakan kelompok dominan di Timur Tengah. Pemerintah Mesir mengembangkan sekulerisme dan membantu AS membelenggu gerakan-gerakan Islam yang diyakini AS sebagai kelompok-kelompok teroris yang mengancam keamanan internasional.

Keberpihakan Mesir terhadap dunia Barat menghilangkan jati diri Mesir sebagai bangsa Arab. Mesir kehilangan kepercayaan dan kekuatan untuk merangkul persatuan bangsa Arab seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasir. Mesir semakin terpuruk dalam kendali AS, semakin tergantung pada bantuan ekonomi AS dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap konflik disekitarnya yang berkaitan dengan agresi Israel.

Setelah terjadinya pergolakan di beberapa negara kawasan Timur Tengah (*Arab Spring*), demonstran Mesir berhasil memaksa Husni Mubarak untuk mundur dari jabatan presiden dan menyerahkan kekuasaan sementara pada Dewan Agung Militer. Kelompok Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan Islam terbesar di Timur Tengah mendapatkan peluang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat untuk memerintah Mesir. Pada pemilihan parlemen tahun Desember 2011 hingga Januari 2012, FJP sebagai sayap politik Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilihan umum dengan mendapatkan 47,2% suara. IM juga mendapatkan kepercayaan rakyat dengan terpilihnya Muhammad Mursi salah seorang petinggi IM sebagai presiden terpilih Mesir untuk menjalankan pemerintahan yang baru.

Gerakan Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan muslim terbesar di Mesir dan Timur Tengah bahkan paling berpengaruh di Dunia. IM menilai hegemoni AS yang kuat di Timur Tengah dan Mesir memberikan dampak buruk terhadap dunia Islam. IM didirikan sejak tahun 1928 dibangun atas dasar keinginan untuk mengembalikan semua aspek kehidupan masyarakat pada ajaran Islam. IM memandang AS telah melakukan penindasan terhadap kelompok-kelompok Islam apalagi keberpihakannya terhadap Israel yang menduduki Palestina. Meskipun gerakan ini mendapatkan tekanan yang sangat kuat sejak didirikan namun terus berkembang pesat menjadi kekuatan paling berpengaruh terhadap peta politik di Timur Tengah. Setelah IM menguasai Mesir, IM menata ulang negara Mesir dengan menekankan aspek demokrasi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan Ideologi yang mendasar dari kepemimpinan IM dari pemerintahan sebelumnya akan berpengaruh pada arah kebijakan luar negeri Mesir pasca terjadinya revolusi.

### **Ikhwanul Muslimin dan Ideologi**

*Jama'ah Al-Ikhwān Al-Muslimūn (Muslim Brotherhood)* atau Ikhwanul Muslimin adalah kelompok gerakan Islam suni yang didirikan oleh Al-Banna pada tahun 1928. Ikhwanul Muslimin didirikan sebagai solusi atas kemunduran Islam yang terpecah belah dan semakin jauh dari nilai-nilai kehidupan Islam. Keruntuhan kekhalifahan Turki Usmani tahun 1924 adalah puncak dari kemunduran umat Islam. Krisis keyakinan, ideologi, ekonomi, perpecahan diberbagai negeri muslim, bahkan penjajahan dan pendudukan diberbagai wilayah muslim semakin melemahkan dan memuat umat Islam tidak berdaya. Dari hal-hal seperti inilah, Hasan Al-Banna mendirikan IM agar dapat mengobarkan persatuan umat Islam dan menjadikan nilai-nilai dan hukum-hukum Islam kembali menjadi dasar-dasar dari seluruh aspek kehidupan.

Kondisi-kondisi kemunduran Islam dan keadaan Mesir yang sudah menjauhkan nilai-nilai Islam dari kehidupannya menjadi salah satu tujuan utama Al-Banna mendirikan IM. Setelah perang dunia pertama usai, Inggris dan Prancis menjadi negara yang paling memiliki kekuasaan di negeri-negeri muslim. Inggris memiliki kekuasaan antara lain di Mesir, Sudan, Irak, Palestina, India (sebelum terpisah dengan Pakistan), Malaysia, Nigeria dan beberapa wilayah Afrika. Sedangkan Prancis memiliki wilayah jajahan yaitu Suriah, Libanon, Afrika Utara (Tunisia, Al-Jazair, dan Maroko) Mauritania, Sinegal dan beberapa wilayah lainnya.<sup>7</sup> Hukum positif Inggris menggantikan secara utuh hukum Islam (*Syari'ah Law*) yang selama tiga belas abad menjadi sumber hukum agama, peradilan dan perundang-undangan di Mesir. Pemikiran barat mulai berkembang dalam semua aspek, baik dalam filsafat, moral, politik, ekonomi, dan budaya barat menjadi rujukan serta tren menggantikan budaya Islam yang sudah berkembang sejak lama.

Keadaan-keadaan yang terjadi di Mesir menimbulkan tuntutan-tuntutan dari berbagai kalangan masyarakat di penjuru negeri Islam untuk mengembalikan ke khalifahan Islam yang telah runtuh tahun 1924. Para kalangan atas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuka agama juga mengikuti arus westernisasi sehingga intervensi Inggris semakin kuat, terutama dalam bidang ekonomi. Akhirnya enam orang rekan-rekan Al-Banna berkumpul berbagi visinya untuk Ismailiyah dan Mesir dan membicarakan perlunya gerakan untuk mengembalikan keadaan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai Islam. Melalui pertemuan ini, Al-Banna mendirikan organisasi "Ikhwanul Muslimin" yang dipimpin langsung olehnya. Nama Ikhwanul Muslimin dipilih oleh Al-Banna :

*"We are brothers in the service of Islam; hence we are "The Muslim Brothers." "*<sup>8</sup>

Al-Banna meyakini bahwa Islam memiliki sistem yang lengkap, aturan-aturan bersumber dari Tuhan baik permasalahan keseharian, hukum, politik dan berbagai aspek lainnya.

Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi Islam berlandaskan ajaran Islam. IM menganut paham suni<sup>9</sup> yang moderat dan universal sesuai dengan Al Qur'an dan Hadis yang dijadikan landasan utama. IM memandang bahwa Islam adalah agama yang universal dan menyeluruh, bukan hanya sekedar agama yang mengurus ibadah ritual seperti shalat, zakat, puasa, haji saja."<sup>10</sup> Pandangan dasar IM terhadap Islam mengikuti mazhab Hambali salah satu dari empat ulama mazhab utama dalam Islam. Mazhab Hambali ini merupakan mazhab yang sangat teliti dalam menafsirkan dan menerapkan Al-Qur'an dan Hadist.<sup>11</sup>

Perhatian utama dari IM berpusat pada dominasi Mesir oleh kekuatan asing yang telah merubah budaya Islam di Mesir, kemiskinan, merosotnya moral masyarakat yang telah terjadi diseluruh pelosok Mesir. IM meyakini bahwa solusi untuk semua permasalahan ini hanya

<sup>7</sup> Yusuf Al Qaradhawi., *70 Tahun Al-Ikhwān Al-Muslimin : Kilas Balik Dakwah Tarbiyah dan Jihad*. Hal. 19

<sup>8</sup> Richard Mitchell, 1993. *The Society of the Muslim Brothers*. London: Oxford University Press. Hal. 8

<sup>9</sup> Istilah Sunni muncul setelah perselisian pendapat tentang khalifah yang berhak memimpin umat Islam, muncul pada masa kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Thalib. Kelompok yang meyakini hanya Ali bin Abi Thalib sebagai pewaris yang berhak dan sah memegang kekhilafahan menggantikan Rasulullah S.A.W dan menolak kekhilafahan Abu Bakr, Umar bin Khattab, dan Utsma bin Affan dikenal dengan kelompok Syi'ah. Dan Kelompok yang meyakini dan mengikuti kekhilafahan seluruh sahabat Nabi Muhammad S.A.W dikenal dengan kelompok Sunni.

<sup>10</sup> Dalam buku *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2*. Hal. 66-67. Hasan Al-Banna menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh : ... "*Berbicaralah kepadaku atas nama Tuhanmu wahai Ikhwan! Jika Islam adalah sesuatu yang bukan politik, bukan sosial, bukan ekonomi, dan bukan peradaban, lantas apa Islam itu?... Islam adalah aqidah dan ibadah, negara dan kewarganegaraan, toleransi dan kekuatan, moral dan materi, peradaban dan perundang-undangan*"

<sup>11</sup> Ziad Munson., *ISLAMIC MOBILIZATION: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim Brotherhood*. Hal. 6

dengan mengembalikan ajaran Islam sebagai pedoman utama dalam masyarakat dan perlunya untuk membangun pemahaman bahwa umat Islam adalah umat yang satu dan harus beesama-sama melawan pengaruh buruk dari budaya barat. Mengenai pandangan tentang persatuan umat Islam ini, IM juga mendapatkan ide-ide dari cendekiawan Islam Jamaludin Al-Afghani. Jamaludin Al-Afghani memiliki pandangan perlunya persatuan umat Islam di seluruh dunia (Pan-Islam) untuk menyingkirkan dominasi barat dan menerapkan Islam sebagai dasar utama dalam kehidupan. Perbedaan-pebedaan dalam padangan Islam harus dicermati dengan baik sehingga tidak memecah belah umat Islam dan semakin menenggelamkan Islam. Pandangan ini juga menjadi dasar bagaimana IM dalam tindakan-tindakan organisasinya.

Hassan Al-Banna merupakan tokoh utama sebagai pendiri dan meletakkan dasar-dasar gerakan Ikhwanul Muslimin. Prinsip-prinsip dasar IM dikumpulkan dalam buku Risalah Pergerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Diantara prinsip dasar gerakan IM terdapat lima selogan, yaitu : *Allah ghayatuna* (Allah adalah tujuan kami), *Ar-Rasul qudwatuna* (Rasul adalah teladan kami), *Al-Qur'an syir'atuna* (Qurban adalah undang-undang kami), *Al-Jihad sabiluna* (jihad adalah jalan kami), dan *Asy-Syahadah umniyyatuna* (Mati syahid adalah cita-cita kami)<sup>12</sup>

Cara pandang Al-Banna tentang pentingnya persatuan umat Islam diseluruh dunia sangat dekat dengan Pan-Islam yang digulirkan oleh Jamaludin Al-Afghani. Jamaludin Al-Afghani merupakan seorang syi'ah yang memiliki pandangan universal sehingga mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengedepankan persatuan. Ide Pan-Islam inilah yang terus dikembangkannya Al-Banna meskipun secara akidah (keyakinan) berbeda dengan Al-Afghani.

Al-Banna memunyai visi untuk menyatukan seluruh umat Islam dan persatuan negara-negara Islam. Tujuan utama Al-Banna dalam IM adalah untuk mempersatukan umat yang terpecah belah setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Sejak awal gerakan ini muncul, IM sangat gencar untuk menyatukan pihak-pihak yang saling bercerai dan bermusuhan dalam kerangka perjuangan untuk Islam, dari kelompok, individu maupun lembaga. Al-Banna menegaskan gerakan tersebut adalah untuk membangun dan menghimpun, tidak menghancurkan, tidak memecah belah.<sup>13</sup>

Keinginan Al-Banna terhadap IM bukan untuk meleburkan akidah, akan tetapi untuk menyatukan barisan (*Tauhidus Sufuf*) dari keduanya sebagai rekonsiliasi, sekaligus koalisi untuk membendung arus ateisme, komunisme, sosialisme, kapitalisme, imperialisme dan hedonisme yang telah terjadi di negeri-negeri Islam.<sup>14</sup>

Al-Banna menyanggah pendapat-pendapat yang menganggap bahwa berpengang pada Islam berarti mengancam hubungan dengan barat, menjadikan barat takut dengan Islam dan berprasangka buruk. Mengenai hal ini, Al-Banna mengemukakan bahwa banyak orang mengira bahwa sistem Islam dalam kehidupan baru akan menjauhkan umat Islam dari negara-negara barat dan dapat merusak hubungan yang sudah terjalin baik, namun dugaan ini tidak beralasan. Islam secara tegas berbicara tentang perjanjian-perjanjian dan melaksanakan

---

<sup>12</sup> Hasan Al-Banna menyebutkan bahwa : "Wahai Ikhwan yang tulus ... ! Inilah bingkai global dakwahmu dan penjelasan ringkas fikrahmu. Engkau dapat menghimpun prinsip-prinsip ini dalam lima slogan: *Allah ghayatuna* (Allah adalah tujuan kami), *Ar-Rasul qudwatuna* (Rasul adalah teladan kami), *Al-Qur'an syir'atuna* (Qurban adalah undang-undang kami), *Al-Jihad sabiluna* (jihad adalah jalan kami), dan *Asy-Syahadah umniyyatuna* (Mati syahid adalah cita-cita kami). Engkau pun juga bisa menghimpunnya dalam berbagai kata berikut: kesederhanaan, tilawah, shalat, keprajuritan, dan akhlak. Cengkeramlah secara sungguh-sungguh bimbingan ini. Jika tidak demikian maka engkau akan jatuh dalam barisan *qa'idin* (yang duduk-duduk santai) yang akan mengantarkanmu menjadi pemalas dan tukang iseng." (Hasan Al-Banna, "Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin (Buku ke-1). Hal. 21

<sup>13</sup> Al-Aqradhawi., *Op.Cit.* Hal.155

<sup>14</sup> Nu'man., *Op.Cit.* Hal. 167

keseepakatan-keseepakatan. Meskipun berhadapan dengan kelompok yang tidak seakidah, Islam tetap meletakkan prinsip-prinsip untuk menghormati perjanjian dan harus dilaksanakan. Al-Banna juga mengungkapkan bahwa :

*"... Para pemimpin politik negara-negara itu seharusnya paham bahwa Islam sebagai sistem kenegaraan adalah sistem paling mulia lagi sakral yang pernah dikenal oleh sejarah. Sedangkan dasar-dasar ideologi yang diletakkan oleh Islam yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga kemuliaannya, adalah dasar-dasar ideologi paling kokoh yang pernah dikenal manusia. Islamlah yang mengumandangkan pemeliharaan hak dan penunaian perjanjian, sebagaimana tersurat dalam firman-Nya, "Tepatilah janji. Sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan (di hadapan Allah)." (Al-Isra': 34)*

*"Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjianmu) dan tidak pula membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa." (At-Taubah: 4)*

*"Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka." (At-Taubah: 7) Mengenai perlakuan baik terhadap orang-orang yang minta perlindungan dan pihak yang memberi perlindungan, Allah swt. berfirman, "Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya sempat mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman." (At-Taubah: 6)*

Prinsip Islam tersebut adalah terhadap orang-orang musyrik, apalagi terhadap orang-orang ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) tentu lebih lunak lagi. Ajaran Islam, yang meletakkan dasar-dasar ideologi ini kemudian mengarahkan umatnya agar komitmen kepadanya, dan memberi jaminan keamanan kepada orang lain agar orang lain pun memperlakukannya dengan sikap serupa. Seharusnya, sikap yang demikian itu menjadi pelajaran bagi negara-negara Barat.

Ikhwanul Muslimin adalah organisasi Islam Suni terbesar yang paling terorganisir bahkan hingga pada level masyarakat terkecil. Tingkat yang paling dasar dari organisasi ini adalah keluarga sebagai sel terkecil yang terdiri sekitar 5 orang. Kemudian sel-sel ini berinteraksi dan berbagi dengan sel-sel yang lainnya dan menunjuk seorang pemimpin yang disebut dengan Naqib untuk mewakili di dewan administrasi cabang Ikhwanul Muslimin setempat. Setiap keluarga diperlukan untuk memimpin masyarakat sekitarnya untuk menuntun gaya hidup secara Islam, memperkuat ikatan dengan umat Islam lainnya, melakukan pertemuan mingguan, serta kegiatan-kegiatan rutinitas seperti sholat, berpuasa, mempelajari Al-Qur'an dengan sesama anggota gerakan, menyumbangkan sebagian pendapatan untuk dana solidaritas yang digunakan untuk anggota yang membutuhkan dan sebagian dimasukkan dalam anggaran kesejahteraan umum dari markas IM. Aktifitas sel-sel ini sangat efektif sebagai pelatihan terhadap anggota-anggota gerakan.

Aktifitas dari sel-sel ini dipantau oleh tingkat administrasi daerah. Bagian ini ditunjuk sebagai badan independen baik secara sosial (kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat) maupun politik. Ditingkat administrasi daerah ini tunduk pada pedoman dari Mursyid 'Am. Di tingkat tertinggi pimpinan Ikhwanul Muslimin disebut *Mursyid 'Am* atau Ketua Umum. Adapun tugas dari *Mursyid 'Am* adalah untuk mengatur organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir hingga cabang-cabang seluruh dunia. Mursyid 'Am di tunjuk oleh dewan syura.<sup>15</sup>

*Mursyid 'Am* yang pernah memimpin Ikhwanul Muslimin adalah Hassan al-Banna (1928 - 1949), Hassan al-Hudhaibi (1949 - 1972), Umar at-Tilmisani (1972 - 1986),

---

<sup>15</sup> *The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center* 19 Juni 2011 [pdf]. Dapat diakses dari : [http://www.crethiplethi.com/download/cp\\_0048.pdf](http://www.crethiplethi.com/download/cp_0048.pdf)



Muhammad Hamid Abu Nasr (1986 - 1996), Mustafa Masyhur (1996 - 2002), Ma'mun al-Hudhaibi (2002 - 2004), Muhammad Mahdi Akif (2004-2010), Muhammad Badie (2010 - sekarang).

### **Determinan Politik Luar Negeri Mesir**

Sesuai dengan Teori W.D. Coplin, bahwa politik luar negeri Mesir dipengaruhi oleh empat determinan atau faktor penentu. Yaitu kondisi domestik, kondisi ekonomi dan militer, konteks internasional, dan faktor perilaku pengambil keputusan.

Mubarak sebagai tangan kanan Sadat, menggantikan posisi presiden melalui referendum nasional pada tanggal 24 Oktober 1981. Sadat ditunjuk Mubarak sebagai wakil presiden pada tahun 1975 dan memimpin partai *National Democratic Party* (NDP). Dalam pidato kepada Majelis Rakyat pada bulan November 1981, Mubarak menguraikan prinsip-prinsip kebijakan pemerintahannya dan membicarakan masa depan yang ia inginkan untuk Mesir. Kebijakan *Infitah* (pintu terbuka) yang di keluarkan Sadat akan terus dilaksanakan dan tidak akan kembali pada kebijakan-kebijakan yang dibatasi seperti era Nasser. Mubarak tetap menjalankan perjanjian damai dengan Israel, untuk menjamin keamanan wilayah terutama semenanjung Sinai serta jaminan bantuan ekonomi dan Militer dari AS.

Setelah pembunuhan Sadat tahun 1981 diberlakukan undang-undang darurat yang memberikan pemerintah mengambil keputusan untuk membatasi hak-hak masyarakat untuk menjaga stabilitas negara. Undang-undang darurat ini terus diperpanjang dalam pemerintahan Mubarak untuk mempertahankan rezim. Aktifitas politik dikuasai pemerintah tanpa memberikan kesempatan bagi lawan politik untuk memperjuangkan kepentingan politiknya. Setiap dilakukannya pemilihan umum, partai pemerintah *National Democratic Party* (NDP) selalu menang dengan mutlak.

Tekanan politik dari pemerintah, keadaan ekonomi yang semakin memburuk, tingginya angka pengangguran menimbulkan gelombang protes dari masyarakat. Tekanan yang dialami rakyat Mesir lebih dari 30 tahun mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Beberapa pengamat mengibaratkan bola salju yang terus membesar selama bertahun-tahun kemudian meletus pada 25 Januari 2011.<sup>16</sup> Dewan Agung Militer atau *Supreme Council of the Armed Forces* (SCAF) yang dipimpin oleh Husein Tantawi resmi memimpin Mesir selama masa transisi. Pemilihan umum parlemen Mesir berhasil dilaksanakan Desember 2011 hingga Januari 2012. Ikhwanul Mulsimin membentuk sayap politiknya dengan mendirikan partai *Hizb Al-Hurriya Wal-'Adalah* (*Freedom and Justice Party*). Tanpa adanya revolusi 2011 IM tidak mungkin bisa mementuk partai politik karena dilarang oleh rezim berkuasa. FJP berhasil mendapatkan 47,2% dan partai An-Nour sayap partai Islam kelompok salafi medapatkan 24,22%. Hasil pemilihan parlemen ini didominasi oleh kelompok Islam, IM dan Salafi. Setelah terbentuknya parlemen Mesir, pemilihan presiden dilaksanakan pada bulan Juni 2012. Ikhwanul Muslimin kembali bertarung dengan saingan-saingan politik untuk memapatkan anggotanya sebagai presiden Mesir. IM mengusung Muhammad Mursi sebagai calon presiden dari partai FJP yang juga didukung oleh An-Nour. Muhammad Mursi yang merupakan anggota dari Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilihan presiden dengan suara 51,7% suara, sedangkan Ahmad Syafiq (mantan perdana menteri era sadat) mendapatkan 48%.<sup>17</sup> Ikhwanul Muslimin menjadi

---

<sup>16</sup> Ahmed Kamel., *The Egyptian Gazette. An analysis of the Mubarak era.* Diakses dari : <http://213.158.162.45/~egyptian/index.php?action=news&id=20580&title=An%20analysis%20of%20the%20Mubarak%20era>

<sup>17</sup> The Guardian. *Muslim Brotherhood's Mohammed Morsi wins Egypt's presidential race.* posted: June 2012. Dapat diakses di: <http://www.guardian.co.uk/world/middle-east-live/2012/jun/24/egypt-election-results-live>

kekuatan utama politik Mesir pasca revolusi dan memberikan perubahan pada kondisi politik dalam negeri serta bentuk baru politik luar negeri Mesir.

Perjanjian damai Camp David yang ditanda tangani tahun 1979 ini menandai era baru hubungan Mesir-Israel. Hubungan Mesir dengan Israel dan AS semakin diperkuat selama pemerintahan Mubarak yang terlihat sangat tergantung dari bantuan-bantuan AS. Mesir kehilangan sumber-sumber pendanaan dari negara-negara Arab dan tidak dapat melakukan kerjasama apapun dengan negara Arab. Amerika Serikat menjadi tumpuan Mesir dalam mengembangkan ekonomi dan memperkuat Militer. Sejak tahun 1979 AS secara intensif memberikan bantuan kepada Mesir untuk memperbaiki militer dan memperbaiki perekonomian.

Penguatan hubungan militer AS-Mesir di Era Mubarak memberikan AS peluang untuk mendapatkan akses militer besar dalam mencapai kepentingannya di kawasan Timur Tengah. Sebuah hal yang tidak dapat disangkal bahwa meskipun seseorang ataupun negara memiliki “hak” tidak akan berarti apa-apa tanpa memiliki kekuatan untuk mempertahankannya ataupun memaksakannya. Oleh sebab itu sangat penting bagi Mesir untuk memperkuat kondisi militer untuk mempertahankan posisi strategisnya di kawasan. Disamping itu, independensi militer Mesir dari kepentingan luar harus dijaga agar sepenuhnya dapat mempertahankan kepentingan nasional. Untuk itu, Mesir harus memulainya dengan membangun industri militer yang bebas dari ketergantungan dengan negara-negara lain. Bantuan-bantuan militer yang diterima Mesir pada dasarnya tidak menguntungkan Mesir. Sejak mengalirnya bantuan AS untuk militer Mesir, AS memperoleh hak-hak istimewa dari pemerintahan Mubarak. Hak istimewa tersebut antara lain izin militer AS di wilayah udara Mesir, tahun 2001-2005 saja telah dilakukan 36.553 penerbangan militer AS di Mesir.<sup>18</sup> AS juga diberikan hak lintasan cepat dan jaminan keamanan untuk melintasi terusan Suez, dalam rentang waktu yang sama tercatat 861 angkatan laut AS melintasi terusan Suez. Jika di perhatikan dengan baik, bantuan-bantuan militer yang diterima Mesir selama beberapa dekade terakhir sepenuhnya menguntungkan AS.

Para perumus kebijakan luar negeri adalah orang-orang yang dihadapkan pada situasi-situasi tertentu, yang bertanggung jawab kepada orang lain, yang ditekan oleh berbagai macam kondisi, dan dipaksa untuk mengambil keputusan.<sup>19</sup> Sebelum terjadinya revolusi Mesir, kebijakan luar negeri Mesir hampir tidak dapat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Mesir ditentukan oleh keinginan Mubarak untuk menjamin pengaruh dan kekuasaan Mesir di seluruh wilayah, serta kepentingan Mubarak untuk menjamin keamanan rezimnya.

Kemenangan Mursi sebagai pemimpin tertinggi negara Mesir tahun 2012 adalah peluang bagi Ikhwanul Muslimin untuk mencapai cita-cita politiknya sejak tahun 1928. Sebagai presiden yang berlatar belakang kelompok Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi akan melakukan tindakan politik luar negeri berdasarkan kepentingan kelompok. Latar belakang Muhammad Mursi adalah anggota Ikhwanul Muslimin yang aktif. Aktifitas Mursi dalam politik Mesir secara aktif telah dimulai ketika Mursi terpilih menjadi anggota perlemen Mesir dari IM tahun 2000-2005.

### **Pola Baru Politik Luar Negeri Mesir Pasca Revolusi 2011**

Dalam pembentukan politik luar negeri suatu negara, faktor psikologis dan latar belakang pengambil keputusan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Pasca revolusi Mesir, Kelompok Ikhwanul Muslimin menjalankan peran sebagai kelompok yang menguasai posisi-posisi strategis dalam politik Mesir. Ideologi yang dibangun oleh gerakan

---

<sup>18</sup> Auf, Yussef., 2012. *Promoting Egypt's Regional Role: Prospects and Challenges*. [pdf]. Oktober. Policy Brief Series. Dapat dilihat di: <https://docs.google.com/file/d/0B0BgZLgnLmsrazdyckhmR2ZnZUK/edit?pli=1>. [Diakses 23 November 2012]

<sup>19</sup> Coplin.*op.cit.* Hal. 32

ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan baru politik luar negeri Mesir. Walaupun pengambil keputusan adalah seorang individu, faktor organisasional yang menjadi latar belakang individu tersebut akan memberikan pengaruh besar dalam membuat suatu keputusan. Peran IM dalam menentukan pola baru politik luar negeri Mesir tidak hanya didukung oleh kuatnya basis dalam masyarakat, namun juga keberadaan anggota dari kelompok ini sebagai pengambil putusan.

Politik luar negeri Mesir yang telah dibangun Mubarak mulai berubah sejak duduknya Mursi sebagai presiden baru. Mursi mengambil langkah aktif dalam menempatkan Mesir dalam peran regional dan internasional. Sebelum maju dalam pemilihan presiden Mesir, Muhammad Mursi merupakan ketua partai FJP yang merupakan sayap politik Ikhwanul Muslimin. FJP dan IM secara aktif menerima kunjungan dan menemui delegasi dari berbagai negara untuk memperkuat hubungan Mesir dan peningkatan kerjasama ekonomi dan politik. Meskipun Mesir merupakan sekutu utama AS di Timur Tengah, Mursi tidak menunjukkan aksi positif dalam hubungan AS-Mesir sebagai mitra strategis. Mursi memulai kunjungan luar negerinya ke Arab Saudi, Cina, Iran yang menyebabkan timbulnya berbagai spekulasi politik. Mursi memperkuat hubungan dengan Arab Saudi serta mengambil langkah aktif terhadap krisis yang terjadi di Suriah. Mesir berhasil mengajak Arab Saudi, Turki dan Iran sebagai kelompok Islam untuk membantu menyelesaikan konflik Suriah. Mursi juga mengunjungi Ethiopia menghadiri KTT Uni Afrika yang tidak pernah dihadiri oleh Mubarak sejak tahun 1995.

Mesir mendapatkan bantuan 1,5 miliar USD dari kerajaan Arab Saudi untuk membantu membangun kembali perekonomian Mesir.<sup>20</sup> Selain bantuan tersebut, Arab Saudi juga memberikan deposit ke bank sentral Mesir 1 miliar USD untuk membantu stabilitas dan pengembangan perekonomian negara. Bantuan ekonomi tidak hanya di terima Mesir dari Arab Saudi, Qatar memberikan 2 miliar USD deposit pada bank sentral Mesir. Bantuan tersebut disampaikan pemerintahan Qatar sehari setelah pertemuan dengan Mursi di Kairo tanggal 30 Juni.<sup>21</sup> Sikap Mursi menunjukkan keengganan pemerintahan Mursi menerima bantuan dari AS dan IMF. Hal tersebut terlihat dari penundaan yang dilakan pinjaman yang dilakukan pemerintahan Mesir meskipun IMF telah siapkan bantuan hingga 4,8 miliar USD. Penundaan tersebut juga dipengaruhi oleh desakan-desakan kelompok-kelompok kepentingan yang tidak menginginkan hutang dari Barat. Agenda politik luar negeri Mursi tidak semata-mata fokus pada pembangunan ekonomi. Seminggu setelah kunjungan pertama ke Arab Saudi, Mursi kembali untuk membicarakan krisis Suriah. Dalam pertemuan ini, Mesir mendorong dibentuknya komite untuk penyelesaian konflik Suriah yang terdiri dari empat negara yaitu Mesir, Arab Saudi, Turki dan Iran. Namun usulan Mesir untuk melibatkan Iran dalam tim untuk mencari solusi krisis Suriah masih ditanggapi dingin beberapa negara Arab.

Langkah Mursi untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab semakin kuat ketika menghadiri KTT non-blok pada 30-31 Agustus di Teheran. Kunjungan Mursi merupakan kontak pertama hubungan antara Mesir dan Iran sejak terjadinya pemutusan hubungan diplomatik tahun 1979. Sambutan yang disampaikan Mursi dalam pembukaan KTT ini menekankan untuk segera mencari solusi untuk krisis Suriah. Tindakan Mursi untuk menghadiri KTT Non-Blok di Teheran mencerminkan bentuk baru dari kebijakan luar negeri Mesir. Mursi tidak hanya menunjukkan keinginan Mesir untuk hubungan yang lebih

---

<sup>20</sup> Al-Masry Al-Youm. *Saudi Arabia to grant Egypt US\$1.5 billion in loans*. Egypt Independent. Published: 11 Sept. 2012. Diakses dari : <http://www.egyptindependent.com/news/saudi-arabia-grant-egypt-us15-billion-loans>. pada tanggal 12 November 2012.

<sup>21</sup> Al-Jazeera. *Qatar pledges \$2bn for Egypt's central bank*. Diakses dari : <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/08/201281261018425841.html>. pada tanggal 19 Agustus 2012

terbuka, namun juga memperlihatkan kebijakan Mesir yang bebas tanpa tekanan dari AS.<sup>22</sup> Padahal sebelumnya pemerintahan Obama telah berupaya menghalangi negara-negara anggota PBB untuk menghadiri pertemuan di Teheran karena dinilai akan mengganggu upaya internasional untuk melaksanakan sanksi terhadap Iran.

Upaya Mesir untuk melibatkan Iran dalam “*Contact Group*” penanganan krisis Suriah merupakan bagian dari keinginan Ikhwanul Muslimin dalam merangkul negara-negara Islam dalam satu kekuatan. Negara-negara Arab terutama Arab Saudi memiliki hubungan yang buruk dengan Iran. Konflik Islam Sunni dan Syiah menjadil latar belakang memburuknya hubungan kedua negara ini. Iran sebagai negara Islam Syi’ah terbesar, berupaya melindungi rezim Bashar Assad yang berlatar belakang Syi’ah<sup>23</sup> dan menuduh Arab Saudi dan Turki mendukung pemberontak untuk menjatuhkan rezim. Sementara negara-negara Arab lainnya menuntut rezim Assad mengikuti keinginan rakyat Suriah. Mursi berupaya melibatkan Iran dalam pembicaraan perdamaian bersama negara-negara Arab lainnya, meskipun banyak negara-negara yang menyangsikan keberadaan Iran tidak akan memberikan solusi. Upaya Mursi ini relevan dengan prinsip Ikhwanul Muslimin yang mengutamakan persatuan Islam, dalam sebuah interview tahun 2007, Mahdi Akief sebagai Mursyid ‘Am Ikhwanul Muslimin menyebutkan :

*“All these things are American Zionist tricks. The Shi’ites attack one another, the Sunnis attack one other, and the Shi’ites attack the Sunnis. But the Muslim Brotherhood has a principle, which I declared from day one: The Shi’ites and Sunnis are brothers.”*<sup>24</sup>

Hubungan Mesir-AS semakin dingin setelah terjadinya serangan terhadap kedutaan besar AS di Mesir. Obama mengecam pemerintah Mesir yang dinilai lamban dalam menangani kasus serangan terhadap kedubesnya. Dalam wawancara yang dilakukan *The New York Times* Mursi menjawab kritikan Obama dengan menyatakan bahwa pemerintah Mesir akan menindak tegas namun harus melakukan tindakan dalam situasi yang tepat. Dalam wawancara tersebut Mursi mengkritik Barat untuk merubah cara pandang dan pendekatannya terhadap dunia Arab.

*“If Washington is asking Egypt to honor its treaty with Israel, he said, Washington should also live up to its own Camp David commitment to Palestinian self-rule. He said the United States must respect the Arab world’s history and culture, even when that conflicts with Western values.”*

Menurut Mursi, Barat harus merubah sikapnya terhadap dunia Arab dengan menghormati nilai-nilai yang ada dan harus membantu membangun negara Palestina agar kebencian yang telah terbangun selama puluhan tahun dapat hilang. Hubungan sekutu antara AS dan Mesir tidak lagi dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan kedua pemimpin negara ini. Obama juga menyatakan bahwa Mesir bukanlah sekutu AS namun juga bukan Musuh baginya. Obama mengatakan :

*“I don’t think we would consider them an ally, but we don’t consider them an enemy. They are a new government that is trying to find its way,”*<sup>25</sup>

Mursi juga menyatakan pemerintahannya akan menjaga hubungan baik dengan Barat akan tetapi tidak akan sama seperti rezim terdahulu. Mursi meminta AS untuk memenuhi tanggung

---

<sup>22</sup>Ernesto Londoño., *Visit by Egypt’s Morsi to Iran reflects foreign policy shift*. Diakses dari : [http://articles.washingtonpost.com/2012-08-27/world/35491859\\_1\\_morsi-nuclear-program-minister-ali-akbar-salehi](http://articles.washingtonpost.com/2012-08-27/world/35491859_1_morsi-nuclear-program-minister-ali-akbar-salehi) . pada tanggal 10 September 2012.

<sup>23</sup>Bridget Johnson. *Bashar al-Assad* . diakses dari : <http://worldnews.about.com/od/syria/p/Bashar-Al-Assad.htm>

<sup>24</sup> *Report on the Roots of Violent Islamist Extremism and Efforts to Counter It: The Muslim Brotherhood*. 2008. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs.

<sup>25</sup> *Obama: Egypt is not US ally, nor an enemy*. Diakses dari : <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19584265> pada tanggal 23 Desember 2012

jawabnya terhadap kemerdekaan Palestina. AS dinilai bertanggung jawab untuk memenuhi perjanjian Camp David 1978 untuk memaksa Israel menarik mundur pasukan dari Gaza dan Tepi Barat serta menyerahkan pemerintahan secara penuh pada rakyat Palestin. Mursi menyatakan :

*“As long as peace and justice are not fulfilled for the Palestinians, then the treaty remains unfulfilled,”*

Meskipun selama bertahun-tahun AS sebagai negara utama yang mendukung perekonomian Mesir, Mursi tidak memanfaatkan kedekatan tersebut untuk membangun kembali perekonomian yang terpuruk pasca revolusi. Mursi lebih memilih mengupayakan kerjasama ekonomi dan bantuan dari negara-negara Arab dan Islam bahkan Cina dari pada memanfaatkan kedekatan dengan AS.

## **Simpulan**

Tindakan politik luar negeri Mubarak yang tunduk pada kepentingan barat di Timur Tengah mulai rubah Mursi. Mursi memulai kunjungan resmi kenegaraannya ke Arab Saudi di susul Ethiopia, Cina dan Iran. Tindakan Mursi ini menunjukkan respon Mursi yang tidak lagi menjadikan AS sebagai sekutu utama Mesir. Mursi lebih memilih melakukan penguatan hubungan ekonomi dengan Cina daripada mempererat hubungan dengan AS telah lama menjadi kekuatan utama membantu ekonomi dan militer Mesir. Mesir juga mempererat hubungan dengan Turki dalam keterliatan dalam politik kawasan maupun kerjasama ekonomi. Unruk membangun perekonomian Mesir yang terpuruk pasca revolusi, Mesir mengandalkan investor dan bantuan dari Arab Saudi, Qatar, Cina, Turki dan melakukan kerjasama dengan negara-negara di Afrika. Langkah positif Mesir juga ditunjukkan Mursi terhadap negara-negara Afrika dengan menghadiri KTT Uni-Afrika di Ethiopia. Pertemuan ini tidak pernah lagi di hadiri Mubarak sejak tahun 1995. Mursi juga membawa Mesir terlibat aktif dalam upaya perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Mursi juga merangkul Iran, Turki dan Arab Saudi untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan konflik Suriah. Hubungan Mesir dan AS terlihat semakin menjauh, hingga akhir 2012 tidak ada terjadi pertemuan bilateral tingkat kepala negara diantara kedua negara ini.

Berdasarkan hasil-hasil temuan dalam memaparkan peran IM dalam membangun politik luar negeri Mesir, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ikhwanul Muslimin merupakan Organisasi Islam Suni yang memiliki akar kuat dalam masyarakat Mesir dan memiliki basis diberbagai negara di Timur Tengah.
2. Independensi Politik Luar Negeri Mesir terbelenggu oleh perjanjian *Camp David* 1978 dan Perjanjian damai Israel – Mesir 1979
3. Pasca revolusi 2011 Ikhwanul Muslimin Mesir mendominasi politik Domestik Mesir dan memegang peran penting dalam pembuatan keputusan luar negeri
4. Mursi mengambil langkah aktif untuk memperkuat hubungan Mesir dengan lingkaran afiliasi : Arab, Afrika dan Islam
5. Mursi berupaya untuk terlepas dari ketergantungan terhadap bantuan AS dengan membuka investasi pada dunia Internasional terutama Cina

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Banna, Hasan., *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 1*. Diterjemahkan oleh Anis Matta, dkk. 2001. Solo: Era Intermedia
- \_\_\_\_\_. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2*. Diterjemahkan oleh Anis Matta, dkk. 2001. Solo: Era Intermedia
- Al Qaradawi, Yusuf. 1999. *70 Tahun Al-Ikhwan Al-Muslimun*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- \_\_\_\_\_. 2008. *Legalitas Politik : Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia
- Al-Awadi, Hesham. 2004. *In Pursuit of Legitimacy The Muslim Brothers and Mubarak, 1982-2002*. New York : Tauris Academic Studies
- Asrudin & Mirza Jaka Suryana (peny.). 2009. *Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer*.
- Coplin, William D. dan Marsedes Marbun. 2003. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Edisi Kedua. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: NUANSA.
- Holsti, K.J., 1983. *International Politics. A Framework for Analysis*. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliff, N.J., USA. Terjemahan Wawan Juanda, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. Bina Cipta. Bandung
- \_\_\_\_\_. 1988. *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis*. Edisi Keempat. Jilid 1 – 2. Terjemahan M. Tahrir Azhary. Jakarta : Erlangga.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen., 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Penerjemah Dadan Suryadipura; Penyunting Kamdani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marshall, Catherine and Gretchen B Rossman., 1994. *Designing Qualitative Research 2<sup>nd</sup> Edition* California: Sage Publication
- Mas'oeed, Mohtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mitchell, Richard., 1993. *The Society of the Muslim Brothers*. London: Oxford University Press
- Morgenthau, Hans J. 1991. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nu'man, Farid. 2004. *Al Ikhwan Al Muslimun : Anugrah Allah yang Terzalimi*. Edisi Kedua. Depok: Pustaka Nauka
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochammad Yani, 2006, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pusat Bahasa., 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rubin, Barry. 2010. *The Muslim Brotherhood : The Organization and Policies of Global Islamist Movement*. New York: PALGRAVE MACMILLIAN
- Sihombing, Frans Bona (peny.). 1984. *Ilmu Politik Internasional: Teori, Konsep, dan Sistem*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Steans, Jill & Lloyd Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. Diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Deasy Silvyia Sari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wiktrowicz, Quintan., 2001. *The Management of Islamic Activism*.. New York: State University of New York Press

- Zahid, Mohammed. 2010. *The Muslim Brotherhood and Egypt's Succession Crisis : The Politics of Liberalization and Reform in the Middle East*. New York: Tauris Academic Studies.
- Zollner, Barbara H. E. 2009. *The Muslim Brotherhood : Hasan al-Hudaybi and Ideology*. New York: Routledge

#### ARTIKEL, JURNAL, SKRIPSI, TESIS DAN LAPORAN

- Aboul-Enein, Youssef H., 2003. *Al-Ikhwan Al-Muslimeen: The Muslim Brotherhood*. Military Review. [pdf]. July-August. Dapat diunduh di : <http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/milreview/abo.pdf> [diakses 23 Juli 2012].
- Arafat , Alaa Al-Din., 2009. *The Mubarak Leadership and Future of Democracy in Egypt*. in the United States a division of St. Martin's Press LLC, 175 Fifth Avenue, New York
- Auf, Yussef., 2012. *Promoting Egypt's Regional Role: Prospects and Challenges*. [pdf]. Oktober. Policy Brief Series. Dapat dilihat di: <https://docs.google.com/file/d/0B0BgZLgnLmsrazdyckhmR2ZnZUk/edit?pli=1>. [Diakses 23 November 2012]
- Dalacaura, Katerine., 2010. *US Foreign Policy and Democracy Promotion in the Middle East: Theoretical Perspectives and Policy Recommendations*. [pdf]. Ortadoğu Etütleri, Volume 2, No 3, July.
- Emerson, Steven., 2008. *Report on the Roots of Violent Islamist Extremism and Efforts to Counter It : The Muslim Brotherhood*. Senate Commite on Homeland Security and Governmental Affairs. Tersedia di: <http://www.investigativeproject.org/documents/testimony/353.pdf> [Diakses 13 Juli 2012]
- Hala G. Thabet., 2006. *Egyptian Parliamentary Elections : Between Democratisation and Autocracy*. Council for the Development of Social Science Research in Africa.
- Munson, Ziad., 2002. *ISLAMIC MOBILIZATION: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim Brotherhood*. [pdf]. Department of Sociology: Harvard University
- Nafaa, Hassan., 2010. *Egypt's foreign policy: Challenges and prospects for correction*. [pdf] Al Jazeera Centre for Studies.
- Paison, Michelle. 2009. *The History of The Muslim Brotherhood: The Political, Social and Economic Transformation of The Arab Republic of Egypt*. Diunduh dari: <http://www.tuftsgloballeadership.org/files/resources/nimep/v4/The%20History%20of%20the%20Muslim%20Brotherhood.pdf> [Diakses 29 April 2012]
- Jeremy M., 2012. *Egypt: Background and U.S. Relations*. CRS Report for Congress. [pdf]. 13 September. Dapat diunduh di: <http://fpc.state.gov/documents/organization/198051.pdf> [Diakses 15 Juni 2012].
- \_\_\_\_\_, 2012. *Egypt: Background and U.S. Relations*. CRS Report for Congress. [pdf]. 6 Desember 2012. Dapat diunduh di : <http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf> [Diakses 12 Desember 2012]
- Thorsten Hoffmann., 2011. *The Muslim Brotherhood in Egypt :Pursuing Moderation Within An Authoritarian Environment*. M.A. Monterey, California: Naval Postgraduate School.
- Williams, Rebecca and Mary Kaszynski., 2011. *Understanding US Aid to Egypt* . Dapat di akses di: <http://www.connectusfund.org/blogs/understanding-us-aid-egypt-rebecca-williams-and-mary-kaszynski> [diakses 23 Oktober]
- Andrey V. Korotayev & Julia V. Zinkina. *EGYPTIAN REVOLUTION:A DEMOGRAPHIC STRUCTURAL ANALYSIS*. Russian Foundation for Basic Research Diakses dari : [http://cliodynamics.ru/download/Korotayev\\_Zinkina\\_Egyptian\\_Revolution\\_Entelequia\\_New.pdf](http://cliodynamics.ru/download/Korotayev_Zinkina_Egyptian_Revolution_Entelequia_New.pdf) [Diakses 2 Desember 2012]